

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

### **B. Buku**

Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Agus, D. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Hasan, A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Locke, J. (1689). *Two Treatises on Civil Government*. England: Awnsham Churchill.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Cet 2 . Jakarta: Kencana.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Poerwadarminta. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Ryass, R. M. (1997). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.

### C. Internet

Astuti, A. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/> Penegakan hukum adalah proses dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, diakses 23 April 2022.

Baru, S. P. (2016). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja. <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/>, di akses pada 23 April 2022.

Nottrela, U. V. (2015). Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietas/article/viewFile/7919/7480>, diakses pada 23 April 2022.

Sovia, H. (2018). Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertibannya-yustisial-oleh-satpol-pp-1t5b0382e059f92>, diakses pada 23 April 2022.